

ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Minggu ke-1, Bulan Desember 2021 (tanggal 26 November s.d. 2 Desember)

PUTUSAN MK DAN IMPLIKASINYA BAGI DUNIA USAHA

Hariyadi
Peneliti Madya/Kebijakan Publik
hariyadi@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI



ISU ATAU PERMASALAHAN

Putusan MK tentang UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) menyulut respons cepat dunia usaha terkait dengan risiko kepastian usaha yang mulai terbangun setelah hampir semua peraturan pelaksanaannya dikeluarkan. Bagi dunia usaha UU CK menjadi suatu keniscayaan untuk menciptakan iklim usaha, daya saing, dan investasi yang kondusif. Hal ini tentu didasari oleh semangat pengaturannya untuk memangkas regulasi yang tumpang-tindih dan prosedur yang berbelit-belit untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi. Dunia usaha juga mengkhawatirkan implikasi putusan itu bagi upaya perbaikan hal-hal tersebut di atas. Dalam rangka ini, dunia usaha memandang revisi UU CK tidak seharusnya menguburkan semangatnya. Waketum Kadin, misalnya menilai dampak riil putusan MK akan ditentukan oleh tindak lanjut hasil revisi UU CK tersebut.

Namun demikian, ruang optimisme masih terbuka. Presiden menegaskan kesiapan pemerintah untuk merevisi bersama DPR RI secara cepat dan selama proses tersebut, seluruh peraturan pelaksanaan UU CK akan tetap berlaku. Artinya, agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan tetap *on the track* sesuai dengan semangat UU tersebut. Penegasan pemerintah ini tentu dilandasi dampak positif implementasi UU CK. Merujuk data BKPM, kenaikan realisasi investasi pada tahun ini telah mencapai 7,8% atau senilai Rp659 triliun (yoy Januari-September). Hal yang sama penciptaan lapangan kerja. Pada Triwulan I – III tahun 2021 misalnya, lapangan kerja tercipta bagi 912.402 tenaga kerja.

Setali tiga uang, dari sisi perizinan, OSS (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* amanat UU CK) telah menerbitkan 379.051 perizinan berusaha dalam kurun Agustus-Oktober 2021 dan dari jumlah itu, 94,42% diterbitkan untuk usaha mikro. Dengan demikian, revisi UU CK tetap perlu mengedepankan *win-win solution* dan tidak meninggalkan semangat bagi perbaikan kegiatan usaha.



SUMBER

Kompas, 27,28 November, dan 1 Desember 2021; Media Indonesia, 27 November dan 1 Desember 2021.